

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGHAPUSAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KETAPANG

Theodorus Sunardi Hutabarat
NPP. 30.0901

*Asdaf Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:

theo168dj@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si

ABSTRACT

Problems/Background: *there are many heavily damaged goods that have not been written off and cannot be accounted for, even though the Ketapang district itself has used an e-government based system in the process of collecting data and managing regional property.*

Objectives: *to identify and analyze the implementation of e-government in increasing accountability for asset management in the process of writing off regional property and to find out the supporting factors and inhibiting factors and efforts to overcome the inhibiting factors in increasing accountability for asset disposal through the implementation of e-government in Ketapang district.* **Method:** *The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach, with data collection techniques through interviews (6 informants), observation, and documentation. Based on research theory using e-government implementation theory from Pairs Cheek where the factors that influence the success of e-government implementation are information technology, human and organizational factors.* **Results/Findings:** *the three factors referred to have not been optimally utilized by the regional government of Ketapang district. In the Ketapang district itself the write-off system is still in the digitization stage, apart from that the human resource factor, namely the passive management of goods and an organizational culture that only keeps records at the time of budgeting and procurement, makes many heavily damaged assets unknown or lost so that it cannot be carried out. deletion process.* **Conclusion:** *The implementation of erasing regional assets in Ketapang Regency through e-governrment is still said to be not good because the quality of output and input is inadequate, staff and skills are not yet good, and the organizational structure cannot yet support regional asset management.*

Keywords : *Asset Write-off Accountability; Coordination; Digital system enhancement; e-government implementation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: banyaknya barang rusak berat yang belum dihapuskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya padahal kabupaten ketapang sendiri sudah menggunakan sistem berbasis e-government dalam proses pendataan dan pengelolaan barang milik daerahnya. **Tujuan :** untuk mengetahui dan menganalisa implementasi e-government dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset pada proses penghapusan barang milik daerah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat dalam peningkatan akuntabilitas penghapusan aset melalui implementasi e-government di kabupaten ketapang. **Metode :** Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (6 informan), observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan Teori penelitian dengan menggunakan teori implementasi e-government dari Pairs Cheek dimana faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi e-government adalah faktor teknologi informasi, manusia dan organisasi. **Hasil/Temuan :** ketiga faktor yang dimaksud tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah kabupaten Ketapang. Di kabupaten Ketapang sendiri sistem penghapusan masih didalam tahap digitasi, selain itu faktor sumber daya manusia yaitu pengurus barang yang pasif dan budaya organisasi yang hanya melakukan pencatatan pada saat penganggaran dan pengadaan saja membuat banyak aset yang rusak berat tidak diketahui keberadaannya atau hilang sehingga tidak bisa dilakukan proses penghapusan. **Kesimpulan :** Pelaksanaan penghapusan aset daerah di Kabupaten Ketapang melalui e-governrment masih dikatakan belum baik dikarenakan Kualitas Output dan Input belum memadai, staff dan keterampilan yang belum baik, dan struktur organisasi yang belum bisa menunjang pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci : Akuntabilitas Penghapusan Aset; Koordinasi; Peningkatan sistem digital; implementasi e-government

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang cepat membawa banyak sekali inovasi berbasis digitalisasi yang diterapkan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Semangat penerapan e-government di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang mengamanatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi di semua tingkatan pemerintahan. E-Government diimplementasikan setiap pemerintah melalui gagasan inovasi berstandar teknologi melalui pembuatan aplikasi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, salah satunya inovasi dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah. Di kabupaten ketapang sendiri Pengelolaan aset dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah atau aset daerah di kabupaten Ketapang sudah menerapkan basis digital yang dibuat oleh pemerintah kabupaten

Ketapang sendiri melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi didalam proses pengelolaan aset salah satunya adalah didalam proses penghapusan aset daerah. Masih banyaknya aset berupa peralatan dan mesin yang rusak berat dan tidak dihapus pada organisasi perangkat daerah adalah sebanyak 1.034 buah(2022). Dikarenakan dengan banyaknya barang yang rusak maka akan membebani proses pembukuan. Dengan adanya aplikasi simply aset maka proses penghapusan akan semakin mudah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak aset daerah yang rusak berat yang belum dihapus dan mengakibatkan proses perbaikan penatausahaan aset pun menjadi terhambat. Hal tersebut dapat dilihat pada jurnal koreksi aset Kabupaten Ketapang tahun 2021 dimana ada sekitar 417 aset daerah yang tidak informatif. Hal inilah yang akan peneliti angkat dimana peneliti ingin meneliti hambatan apa yang menyebabkan pemerintah kabupaten ketapang belum bisa mengelola aset dengan efektif dan efisien melalui implementasi e- government dalam penghapusan dikarenakan masih banyak aset rusak yang belum dihapus dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar e- government dapat diimplementasikan dengan baik didalam proses penghapusan aset sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas Penghapusan aset melalui pendataan aset didalam digitalisasi pembukuan.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan proses penghapusan aset daerah di Kabupaten Ketapang dimana banyak sekali barang rusak berat yang belum dihapuskan serta banyaknya keberadaan aset yang belum diketahui sehingga berkurangnya akuntabilitas penghapusan aset daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Selama ini Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah menerapkan teknologi dalam proses pengelolaan aset termasuk didalam proses penghapusan aset daerah, yaitu melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset (SIKUAT) dan Sistem Informasi Aset Kabupaten Ketapang (SIABANG) akan tetapi proses penghapusan juga tidak berjalan secara efektif karena menurut Telaahan BPK Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 ada sekitar 1.034 Barang dari 28 OPD tercatat Rusak Berat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Implementasi e-government oleh pemerintahan daerah sebagai referensi atau perbandingan untuk dijadikan sebagai acuan. Penelitian dari Harlina Dwi Asary (2020, Universitas Indonesia) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi E-government di Kabupaten Bogor: Studi Kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi E-government di Kabupaten Bogor yang difokuskan pada studi kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” untuk izin mendirikan bangunan (IMB) pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif – analitis, Teknik Pengumpulan data studi kasus dengan mengumpulkan bahan melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Teori Penerapan e-government Alsheri (2010:8), Teori Pelayanan Sinambela (2006) dan Teori Tantangan Organisasi Feng (2003).

Penelitian dari Andreas Victor Jufan Ratu (2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Dalam pada peningkatan PengeLoaian Aset di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui dan menganalisis implementasi SIMDA BMD serta kendala dalam pengimplementasian sistem informasi tersebut dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kendala implementasi SIMDA BMD dalam meningkatkan pengeLoaian aset di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi. Teknik pengambilan data yaitu dengan mengumpulkan bahan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward III dan Teori E-government oleh Yildiz (2007).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan dua penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Koordinasi Pemerintahan dalam meningkatkan akuntabilitas penghapusan aset di Kabupaten Ketapang. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Implementasi e-government oleh pemerintah dalam Mengelola aset daerah khususnya dalam siklus penghapusan aset daerah di Kabupaten Ketapang dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menganalisa serta mendeskripsikan Implementasi E-government Dalam Peningkatan Akuntabilitas Penghapusan Aset Daerah Di Kabupaten Ketapang, Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi E-government Dalam Peningkatan Akuntabilitas Penghapusan Aset Daerah Di Kabupaten Ketapang , dan Mengetahui dan Menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Implementasi E-government Dalam Peningkatan Akuntabilitas Penghapusan Aset Daerah Di Kabupaten Ketapang.

II. METODE

Menurut Umar Sidiq (2019), data yang didapat dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka yang diperoleh dari hasil dari wawancara dan didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Implementasi e-government dalam meningkatkan akuntabilitas penghapusan aset daerah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Ketapang, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, Programmer/ operator komputer yang bersangkutan dalam pengelolaan aset, Pengurus barang SKPD lain di Kabupaten Ketapang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi E-Government Dalam Peningkatan Akuntabilitas Penghapusan Aset Daerah Di Kabupaten Ketapang menggunakan teori dari *Heeks Richard* dalam Napitupulu (2020). Teori tersebut memiliki 7 indikator dalam mengukur Implementasi e-government yaitu Informasi, Teknologi, Proses, Tujuan, Nilai, dan Motivasi, Staff dan Keterampilan, Manajemen dan Struktur, dan Sumber daya lainnya. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1 Informasi dan Teknologi

Didalam memberikan informasi serta menjamin transparansi pengelolaan aset, Pemerintah kabupaten ketapang melalui pihak ketiga membuat suatu aplikasi bernama SIABANG. Aplikasi SIABANG memberikan informasi tentang keberadaan barang milik daerah kabupaten ketapang, misalnya Keberadaan tanah dan bangunan yang telah terdaftar dan terkoneksi dengan map kabupaten ketapang. Aplikasi tersebut di displaykan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai keberadaan suatu aset sehingga dengan aplikasi tersebut memberikan informasi serta transparansi kepada masyarakat. yang memudahkan kita untuk mencari data mengenai aset daerah yang dimiliki kabupaten ketapang. Selain SIABANG aplikasi yang digunakan didalam pengelolaan barang milik daerah adalah aplikasi SIKUAT. Aplikasi SIKUAT digunakan untuk penatausahaan dan pelaporan barang Milik Daerah. Di kabupaten Ketapang sendiri aplikasi SIKUAT merupakan bagian dari SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Akan tetapi kualitas prasyarat input dan output dalam penghapusan aset daerah masih belum memadai dikarenakan data yang diperoleh dari setiap OPD belum bisa tercantum disetiap fitur yang ada di sistem informasi yang dipakai selain itu penerapan

penghapusan aset masih belum digitalisasi tetapi masih dalam tahap digitasi.

3.2 Proses

Penghapusan Aset Daerah di Kabupaten Ketapang mengikuti prosedur atau alur pemusnahan aset daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian Proses yang diterapkan didukung oleh hardware yang memadai serta pedoman dan modul literasi yang lengkap hal itu dilihat dari adanya literasi dalam bentuk modul mendukung proses pengelolaan aset sesuai dengan prosedur yang ditetapkan kemudian adanya perangkat pendukung seperti monitor, komputer, dan laptop yang memadai dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset di BPKAD Kabupaten Ketapang. Pengelolaan Aset di kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta didukung oleh peralatan yang memadai.

3.3 Tujuan, Nilai, dan Motivasi

Menurut Napitupulu (2020:8) Tujuan, nilai, dan motivasi merupakan jabaran dari faktor pendukung dari dalam organisasi tersebut yang berhubungan dengan sumber daya manusia misalnya budaya organisasi serta nilai-nilai yang ada di suatu perangkat daerah yang berpengaruh terhadap implementasi dalam penerapan e-government. Didalam melihat kualitas sumber daya manusia peneliti mengacu pada penghapusan aset berupa barang rusak berat yang masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan dari 28 Organisasi Perangkat Daerah hanya 5 organisasi perangkat daerah yang tercatat melakukan pengusulan penghapusan. Hal tersebut dikarenakan kurang berkompetensinya pengurus barang dalam menginventarisasi serta sering terjadinya pergantian jabatan pengurus barang setiap tahunnya yang mengakibatkan pengurus barang yang baru kewalahan dalam menginventarisir barang yang ada. Padahal untuk memotivasi pengurus barang, Pemerintah Kabupten Ketapang sudah memberikan Tunjangan Pengurus Barang.

3.4 Staff dan Keterampilan

Staff dan Keterampilan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar teknologi seperti ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terampil dan kecukupan pelatihan yang disediakan untuk menggunakan sistem digital yang tersedia (Napitupulu 2020). Dalam proses peningkatan kompetensi dalam pengelolaan penghapusan aset melalui digitalisasi, BPKAD Kabupaten Ketapang setiap tahunnya memberikan pelatihan terhadap pengurus barang setiap Organisasi Perangkat Daerah melalui Pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi.

3.5 Manajemen dan Struktur

Didalam Struktur Organisasi, Bidang aset sendiri hanya terdiri dari 2 sub bidang yaitu subbidang pengelolaan aset daerah dan subbidang penghapusan dan hibah aset daerah. Kedua subbidang tersebut dibentuk dari awal bidang aset tersebut dibentuk karena sebelumnya bidang aset masuk kedalam bagian umum pada sekretariat daerah. Struktur Organisasi di kabupaten ketapang belum bisa mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas penghapusan aset dikabupaten Ketapang dikarenakan aset mempunyai permasalahan yang kompleks serta di Kabupaten Ketapang sendiri nilai aset daerah mencapai hamper delapan triliun rupiah dimana 2 subbidang tidak akan cukup untuk mengaturnya.

3.6 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya merupakan faktor pendukung berjalannya penerapan e-government seperti uang, waktu atau perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan proyek. Dalam mendukung peningkatan e-government pengelolaan aset kabupaten ketapang agar proses pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan seluruhnya secara digitalisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mengoptimalkan aplikasi yang dimiliki melalui perencanaan pengadaan proyek seperti membuat penyusunan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai wujud memperbaiki sistem digitalisasi pencatatan hingga pelaporan aset yang dapat dilihat di dalam rancangan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2022. Kemudian sarana prasarana dalam mendukung e-government pada proses penghapusan sudah memadai seperti wifi, laptop, printer, dan GPS.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penghapusan aset di Kabupaten Ketapang masih dalam tahap digitasi dimana aplikasi pengelolaan aset masih hanya sebagai bank data dan bukan digunakan untuk proses penghapusan. Selain itu temuan selanjutnya adalah masih banyaknya data aset yang tidak informative dalam aplikasi SIKUAT dimana pencatatan aset tidak lengkap atau tidak jelas keberadaannya, penyebabnya adalah tidak aktifnya pengurus barang dalam menginventarisasi aset milik institusinya masing-masing dan tidak melaporkan secara aktif kondisi aset yang dimiliki. Hasil temuan tersebut sama dengan temuan dari penelitian oleh Andreas Victor Jufan Ratu dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen

Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Dalam pada peningkatan Pengelolaan Aset di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dimana hasil penelitian tersebut adalah adanya berbagai aset daerah di setiap SKPD atau pengelola barang yang tidak jelas keberadaannya dan tidak melaporkan atau merekonsiliasi aset di kantor BKD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kemudian Temuan selanjutnya adalah sulitnya penghapusan aset terlaksana sehingga mengakibatkan masih banyaknya barang rusak berat didata yang tidak dihapuskan karena keberadaan barang tersebut sudah hilang akan tetapi masih terdata didalam sistem selain itu dalam prosedur penghapusan barang yang diusulkan untuk dihapuskan wajib untuk dihadirkan sehingga jika barang itu hilang maka proses penghapusan tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut selaras dengan temuan Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, & Hermanto dalam Jurnalnya yang berjudul Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram (2018, Universitas Mataram) dimana hasil dari penelitian tersebut adalah Kendala utama yang menjadi penghambat proses penghapusan aset daerah di Kota Mataram adalah Ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu proses hibah di masa lalu yang tidak disertai dokumen, pengawasan yang belum maksimal terhadap BMD rusak berat, seringnya terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penghapusan BMD.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan penghapusan aset daerah di Kabupaten Ketapang melalui e-governmnet masih dikatakan belum baik dikarenakan jika diacu pada teori Heeks (2020) alasannya adalah, Kualitas Output dan Input yang belum memadai dikarenakan data aset yang diperoleh belum lengkap dan kualitas aplikasi yang dimiliki belum mampu memproses penghapusan aset secara digitalisasi, Staff dan keterampilan yang belum baik dikarenakan masih adanya pengurus barang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keberadaan fisik barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan karena barang tersebut hilang, serta Struktur Organisasi yang belum memadai. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses koordinasi berasal dari internal dan eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah Komunikasi dan Koordinasi yang lebih intens dan Optimalisasi sistem informasi dan komunikasi dalam peningkatan akuntabilitas penghapusan aset melalui e-government.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan

biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Ketapang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat *Richard Heeks* dalam Napitupulu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi E-government dalam Peningkatan Akuntabilitas Penghapusan Aset di Kabupaten Ketapang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik: PROSES, Analisis, DAN Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Napitupulu, D. (2020). E-government: Implementasi, Strategi & Inovasi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nursapiah. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press.
- Rusdiana, H. (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian. Bandung: Tresna Bhakti Press Bandung.
- Reswari. (2014). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dalam Menunjang Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Pada Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010 Sampai Dengan 2011). UNIVERSITAS INDONESIA.
- Ratu, A. V. (2018). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SImda Bmd) Dalam Pada Peningkatan Pengelolaan Aset Di Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jatinangor. INSTITUT
PEMERINTAHAN



